

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan adalah masalah utama yang menjadi perhatian, baik di dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi dan merupakan suatu permasalahan yang berkepanjangan. Kemiskinan menyebabkan banyak warga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, kesehatan, sulitnya warga untuk mendapatkan pelayanan yang baik, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Permasalahan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, letak geografis, kondisi lingkungan, akses barang dan jasa, budaya, kesehatan dan politik (Huraerah, 2013).

Data jumlah kemiskinan yang diperoleh dari BPS, menunjukkan angka penduduk miskin yang ada di Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2018 mengalami penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2011, angka penduduk miskin adalah 30,01. Tahun 2012, adalah 28,71 juta jiwa. Tahun 2013, adalah 28,17 juta jiwa. Tahun 2014, adalah 27,73 juta jiwa. Tahun 2015, jumlah penduduk miskin jumlahnya 28,51 juta jiwa. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin adalah 27,76 juta jiwa. Tahun 2017, jumlah angka kemiskinannya 27,77 juta jiwa. Selanjutnya tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah (BPS,2018).

Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan bentuk pembaharuan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pada peraturan tersebut tercantum perintah untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ada di pusat anggotanya terdiri dari: pemerintah, kalangan di bidang usaha, masyarakat, dan aktor pemilik kepentingan lainnya (Tulung, 2011).

Pemerintah memberikan kewenangan otonomi daerah sebagai salahsatu upaya untuk pengentasan kemiskinan, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Dwirandra, 2016). Kemudian undang-undang selanjutnya yang berhubungan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan Pembangunan Desa memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya kebutuhan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan potensi dan perekonomian daerahnya (Samuels & Automodernity, 2016).

Beberapa lembaga atau kementerian mempunyai program yang berfokus pada penurunan angka jumlah penduduk miskin. Salahsatu kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial yang mempunyai focus utama dalam menurunkan angka masyarakat miskin melalui program pemberdayaan masyarakat dan penanganan

fakir miskin (P2FM). Ada lima aktivitas yang dilakukan dari P2FM diantaranya adalah: 1.) Memberdayakan fakir miskin melalui KUBE. Program KUBE dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi yang digerakkan oleh lembaga sosial provinsi, 2.) P2FM-BLPS adalah kegiatan untuk mengembangkan KUBE, dengan cara pengiriman dana langsung ke rekening KUBE selanjutnya mereka bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan sendiri, 3.) Menkuatkan lembaga pembiayaan KUBE untuk melakukan pembinaan berkelanjutan dalam pemberdayaan 4.) Pemulihan rumah yang tidak layak ditempati menjadi layak huni 5) Pendampingan (Sitepu, 2016)

Kebijakan program pengentasan telah dimaksudkan ke dalam beberapa program teknis, contohnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Lubis, 2014). Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah kumpulan keluarga yang masuk ke dalam golongan miskin dan mempunyai kesepakatan untuk membentuk sebuah kegiatan yang berkembang dan saling berhubungan untuk mengembangkan produktivitas anggota, menumbuhkan kerjasama yang serta dan harmonis untuk menjadi tempat mengembangkan kegiatan usaha bersama (Depsos RI,2005). Kelompok Usaha Bersama adalah salahsatu program yang ada di Kementerian Sosial RI yang khususnya pada Direktorat Jenderal pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang digunakan untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (Prawoto, 2009).

Salahsatu program yang dilakukan pemerintah dalam kerjasama pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan anggaran sejumlah Rp 117,7 M untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE (Chrismasari, 2018). Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah setiap provinsi/kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salahsatu yang menjadi sasaran dilaksanakannya program pengentasan kemiskinan adalah Provinsi DIY. Program KUBE dilaksanakan di Provinsi DIY dengan cara pendekatan yang melalui tahap menciptakan kesadaran kelompok untuk membangun kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan sosial ekonomi produktif dengan maksud untuk memberikan nilai tambah perekonomian dan sikap mandiri melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Dinsos Prov. DIY,2010).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin DIY Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
D.I. Yogyakarta	562.10	541.90	532.59	485.56	494.94
Kulonprogo	92.40	86.50	84.67	84.67	84.17
Bantul	158.80	156.60	153.49	153.49	142.76
Gunungkidul	156.50	152.40	148.39	148.39	139.15
Sleman	116.80	110.80	110.44	110.44	84.34
Yogyakarta	37.60	35.60	36.60	36.60	32.06

Sumber : BPS DIY, 2016

Salahsatu Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Provinsi DIY. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Provinsi DIY berada pada urutan ke-19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 460.10. Kemiskinan di Provinsi DIY berada dibawah dengan Jawa Tengah, dan Jawa Barat (BPS,2018). Tingkat presentase kemiskinan penduduk miskin dari seluruh penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar 13,02% (slemankab.bps.go.id). Data BPS menunjukkan pada tahun 2017 angka gini ratio Provinsi DIY menunjukkan angka 0,44, dan Provinsi DIY sebagai provinsi dengan gini ratio tertinggi di Indonesia (BPS,2017).

Kementerian Sosial membuat beberapa program yang ditujukan untuk menguatkan perekonomian ekonomi yang didasarkan pada prinsip kerakyatan untuk mendukung rakyat agar secara mandiri mendirikan usaha-usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dalam bentuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin yang secara tidak langsung untuk mengatasi angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Bentuk kegiatan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kerakyatan untuk mendukung masyarakat yang mandiri dan mampu berdaya saing adalah dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai sebuah program untuk mencapai kesejahteraan sosial keluarga. Program KUBE diarahkan bagi KUBE yang diberdayakan oleh dinas sosial provinsi ataupun kabupaten/kota (Haryati, 2014).

KUBE adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam mengentaskan kemiskinan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang digerakkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan salahsatu program dari Kementerian Sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang mempunyai focus dan kewenangan untuk menetapkan kabupaten yang akan menerima bantuan dan jumlah KUBE yang akan menerima bantuan kemudian Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan untuk mengembangkan usaha melalui dana APBN. Dinas sosial berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui KUBE. Setiap KUBE mendapatkan bantuan Rp 20 juta per KUBE yang digunakan untuk menambah modal dan untuk mengembangkan usaha mereka (Wardhani, 2018).

Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan KUBE bagi masyarakat fakir miskin oleh Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi DIY juga dilaksanakan pada dinas sosial yang berada di tingkat kabupaten/kota, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman pada tahun 2017 mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang melihat pada UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana dalam mengentaskan kemiskinan, dibutuhkan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial (Haryati, 2014).

Program pengentasan kemiskinan KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman, dijalankan di setiap kecamatan-kecamatan yang ada sesuai dengan pengarahannya dan pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan KUBE dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sleman diantaranya adalah Kecamatan Sayegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel. Beberapa kecamatan tersebut menerapkan Program KUBE, di Kabupaten Sleman Program KUBE tersebut dilaksanakan dan diberi nama dengan KUBE Sejahtera.



Gambar 1.1
Kecamatan Miskin Tertinggi di Kabupaten Sleman Tahun 2017
Sumber: Forum Kabupaten RKPD DIY 2017

Salahsatu kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan KUBE di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Sleman. Kecamatan Sleman menempati posisi ke-2 dengan presentase kemiskinan 21% sebagai salahsatu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2017.

Kecamatan Sleman menjadi sasaran pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Salahsatu dari lima desa yang ada di Kecamatan Sleman yang menerapkan program KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan yang tinggi adalah Desa Caturharjo. Penduduk yang tinggal di Desa Caturharjo didominasi oleh penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Kurang lebih sekitar 95% penduduk di Desa Caturharjo bekerja di sektor pertanian. Meskipun, daerah di Desa Caturharjo merupakan daerah yang subur, namun, pertumbuhan ekonomi penduduk yang didominasi bekerja di sektor pertanian belum dapat meningkat secara maksimal dan meningkatkan pendapatan penduduknya secara umum. Penyebabnya adalah fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada belum tersedia dengan lengkap. Masyarakat yang ada di Desa Caturharjo yang bekerja sebagai buruh harian lepas sejumlah 1941 jiwa, buruh tani sejumlah 650 jiwa, kondisi pekerjaan mereka menyebabkan penghasilan yang mereka dapatkan masih belum dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka hanya bisa mengandalkan pendapatan dari hasil panen ketika musim panen datang. Mereka masih sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (<http://www.caturharjo.com>)

Kemiskinan di Desa Caturharjo memang paling tinggi diantara desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Sleman, karena pekerjaan mereka yang bergerak di bidang pertanian sebagai petani dan sebagai buruh harian untuk mengelola lahan yang mereka kerjakan, mereka tidak memiliki keahlian lainnya dan tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha, penyebab lainnya mengapa di Desa Caturharjo memiliki

tingkat kemiskinan tertinggi diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Sleman adalah adanya ketimpangan dalam hal kepemilikan, diantaranya adalah rendahnya factor produksi dan sumber daya manusia, dan di Desa Caturharjo tidak adanya cukup investasi di waktu yang akan datang. Kemudian, factor tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan merupakan factor penting dalam kualitas dan keterampilan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat menjadi miskin karena terbatasnya kemampuan dan keahlian mereka sehingga mereka sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan bercocok tanam sebagai petani memanfaatkan sumber daya alam dan bantuan yang diberikan pemerintah. Desa Caturharjo merupakan desa di Kecamatan Sleman dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari tahun 2016-2017.

Berdasarkan website (<http://www.caturharjo.com>) Desa Caturharjo memiliki KK miskin berjumlah 1.166 orang. Maka yang dilakukan adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan keahlian dan keterampilan masyarakat di Desa Caturharjo, mengembangkan potensi, membangun kesadaran dalam bekerjasama sesama anggota KUBE, sehingga yang terjadi adalah program KUBE dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Caturharjo.

Tabel 1.2
Jumlah KK Miskin, Dan Presentase Per Desa Di Kecamatan Sleman Tahun 2016

NO	Kecamatan/Desa	Jumlah KK	KK Miskin	%KK Miskin Terhadap Jumlah KK
	Sleman	23.116	3.665	15,43%
1	Caturharjo	5.078	1.116	22,27%
2	Triharjo	5.990	863	13,99%
3	Tridadi	4.836	482	9,68%
4	Pandowoharjo	3.978	596	14,78%
5	Trimulyo	3.234	558	16,73%

Sumber : BPS Sleman, 2016

Target dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keterampilan masyarakat adalah sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian dalam mendirikan usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta membangun keterampilan dan keahlian masyarakat miskin. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan hingga ke tingkat desa, salahsatu desa yang menjadi sasaran Program KUBE adalah Desa Caturharjo, yang terletak di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Salahsatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera di Desa Caturharjo berdasarkan beberapa media pemberitaan seperti TribunJogja, AntaraneWS Jogja dan web (<http://www.slemankab.go.id>) yang ada di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman memperoleh juara 1 dalam “Evaluasi KUBE dan Pendamping Berprestasi tahun 2017”. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun

2016, KUBE Sejahtera juga mendapatkan prestasi di tingkat Kabupaten Sleman dan maju ke tingkat DIY pada tahun 2017 dan kemudian memperoleh juara I (Nugroho, 2017). Tetapi, pada kenyataannya, meskipun salahsatu KUBE tersebut berhasil, dan telah diterapkan Program KUBE sejak tahun 2015 di Desa Caturharjo, angka kemiskinan di Desa Caturharjo pada tahun 2016-2017 masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, bahkan, dibandingkan dengan tahun 2016, angka kemiskinan di tahun 2017 lebih tinggi jumlahnya padahal telah diterapkan Program KUBE sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Caturharjo, setelah Program KUBE diterapkan di Desa Caturharjo, angka kamiskinan disana tidak mengalami penurunan, Desa Caturharjo masih menjadi desa dengan angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera di Desa Caturharjo, pada tahun 2016-2017 telah berhasil mendapatkan penghargaan, namun pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Caturharjo dari tahun 2016-2017 yang terbukti dengan angka kemiskinan di Desa Caturharjo yang masih menempati posisi pertama sebagai desa dengan kemiskinan tertinggi di Kecamatan Sleman, dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan tersebut. Gap yang besar tersebut menjelaskan kurang efektifnya program KUBE dalam upaya mengatasi kemiskinan di Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman. KUBE yang merupakan program yang dibentuk pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dirasa belum optimal dapat menurunkan angka kemiskinan di Desa Caturharjo, karena di Desa

Caturharjo angka kemiskinan penduduknya masih tinggi mencapai angka 22,27%. Dalam pelaksanaannya apakah KUBE telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul skripsi “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017”, dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam hal pembentukan, pelaksanaan, pengelolaan, KUBE di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kegiatan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017.

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program KUBE Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai referensi atau acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat menjadi kanjian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan Program KUBE Sejahtera Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Program KUBE Sejahtera Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dapat dijadikan sarana memperbaiki dan evaluasi Program KUBE Sejahtera yang diterapkan di Desa Caturharjo berdasarkan kendala-kendala yang ada pada program tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Menumbuhkan semangat masyarakat anggota pemberdayaan KUBE dalam mengikuti pertemuan rutin untuk tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan.

E. Tinjauan Pustaka/Literature Review

Dalam mengembangkan pengetahuan peneliti tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perlu adanya dilakukan studi pustaka, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Hasil/Temuan
1.	Ibrahim Imron, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto (2014)	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 485-491	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dawuhan dimulai pada tahap pembentukan, selanjutnya praktik dan terakhir ialah tahap memberikan bantuan. Permasalahan berkaitan dengan factor-faktor penghambat KUBE, yang pertama adalah masalah dari dalam yaitu sedikit anggota yang belum sadar dan bisa untuk paham serta pelaksanaan tujuan kelompok, kemudian dualisme pekerjaan yang dilaksanakan pendamping lapangan, kebudayaan dan lingkungan luar Desa Dawuhan serta pihak

			pemerintah yang masih kurang menunjukkan kualitas dalam intensitas pengawasan dilapangan.
2.	Hendrik Yasin (2015)	Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 38–41	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dijelaskan potensi KUBE yang ada di Desa Kuala, yaitu pada usaha catering, perbengkelan dan pertukangan meubel. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberdayaan KUBE diantaranya adalah modal usaha yang kurang, fasilitas dan peralatan yang ada belum lengkap.
3	Haryati R (2013)	Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jurnal Informasi Vol. 18, No. 02, Tahun 2013	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam mengamati KUBE di Kota Banda Aceh, Kabupaten Nganjuk, Kota Banjarmasin, dan Kota Tomohan, KUBE yang dilaksanakan di kabupaten dan kota-kota tersebut dilaksanakan dengan Tahapan persiapan, pelaksanaan, bimbingan usaha, kemitraan usaha, dan pengendalian.

No	Peneliti	Judul	Hasil/Temuan
4	Wayan Tamba dan Mohnan (2016)	<p>Identifikasi Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</p> <p>Jurnal Paedagogy Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2016 Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Mataram</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUBE di Dusun Cemare ini yaitu antara lain: a) faktor lingkungan, b) sikap saling menghormati antara pengelola dengan anggota, c) sikap saling percaya antara pengelola dengan anggota, dan d) partisipasi masyarakat. Keberhasilan KUBE di Dusun Cemare dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki tabungan, mampu membiayai anak mereka sekolah, serta memiliki kemampuan dalam bidang usaha ekonomi produktif.</p>
5	Moh. Sidik Priadana dan Effendi M. Guntur (2010)	<p>Analisis Faktor Penentu Keberhasilan serta Dampak dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa Barat</p> <p>Trikonomika Volume 9, No. 2, Desember 2010, Hal. 78–86 ISSN 1411- 514X</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode induktif. Dalam metode induktif menggunakan metode penelitian survey penjelasan (<i>explanatory survey method</i>). Faktor keberhasilan KUBE di Jawa Barat diantaranya adalah pembuatan peraturan dan pengorganisian, kualitas kelembagaan KUBE, Kekampuan modal ekonomi keanggotaan, pendidikan dan pelatihan, jiwa</p>

			<p>kewirausahaan, langkah-langkah menjalin kerjasama merupakan variabel dominan yang mengembangkan KUBE. Variabel pengembangan Kelompok Usaha Bersama memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota KUBE, variabel peningkatan pendapatan anggota KUBE juga ikut memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan</p>
6	<p>Ade Octavia, Erida, Sumarni, dan Iskandar Sam (2016)</p>	<p>Pelatihan Kewirausahaan Dan Manajemen Bagi Ibu Rumah Tangga, Remaja Putri Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mutiara Kota Jambi</p> <p>Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Volume 31, Nomor 3 Juli – September 2016</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa melalui penerapan IPTEKS melalui kegiatan PPM ini dapat meningkatkan motivasi ibu-ibu yang bekerja di rumah, kalangan remaja dan Kelompok Usaha untuk menjadi wirausaha. Kemampuan manajemen usaha kelompok untuk mengembangkan usaha produktif menunjukkan peningkatan, Pada aspek manajemen usaha dan pemasaran produk, mitra telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat menembus swalayan di Kota Jambi</p>
7	<p>H.M. Achmad Subing</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil penelitian</p>

	(2013)	<p>Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Lampung</p> <p>Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 3 No. 2 April 2013 : 160-177</p>	<p>menjelaskan pengembangan pola yang ada di Provinsi Lampung berkembang sesuai berjalannya waktu dan pola perkembangan memiliki hubungan dengan keadaan yang berkembang dan jenis kegiatan yang dilakukan anggota sangat berpengaruh terhadap pola perkembangan. Pola perkembangan saat ini, belum menggambarkan kelanjutan pengembangan usaha anggota yang telah berhasil. Diantara proses pembuatan kebijakan, system organisasi, pelebagaan KUBE yang berkualitas, keterampilan dalam permodalan ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan, kemampuan kewirausahaan, langkah kerjasama, memiliki hubungan yang terikat</p>
8	<p>Andi Fitrah P. Putra, Juanda Nawawi, dan Rahmatullah (2014)</p>	<p>Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</p> <p>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (127-136) ISSN 1979-5645</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Dinas sosial memiliki peran dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar, yang dilakukan dinas sosial adalah dengan cara membuat program pemberdayaan masyarakat miskin seperti program bantuan</p>

			usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok usaha bersama (KUBE). Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program UEP dan KUBE didalamnya.
--	--	--	---

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Setelah melihat hasil temuan penelitian dari beberapa peneliti diatas, dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan tentang Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dengan beberapa penelitian terdahulu. Persamaan yang terlihat dalam pelaksanaan program KUBE yang telah dilakukan penelitian adalah dalam praktiknya semua program pengentasan kemiskinan memiliki factor-factor pendukung dan factor-factor penghambat dalam pelaksanaan program KUBE. Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan yang terlihat dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dijalankan adalah belum ada yang meneliti tentang efektivitas Program KUBE, terutama Program KUBE yang ada di Desa Caturharjo yaitu KUBE Sejahtera, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman yang disana terdapat KUBE yang berhasil mendapatkan juara pada perlombaan evaluasi KUBE, bahkan hingga ke tingkat nasional, namun tingkat kemiskinan yang ada di desa tersebut masih merupakan yang tertinggi.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2001) menjelaskan pengertian efektivitas, disini yang dimaksud efektivitas adalah suatu tolak ukur yang menggambarkan seberapa jauh tujuan yang bisa dicapai (Juli Panglima Saragih, 2014).

Menurut Effendy (2003) efektivitas yaitu komunikasi yang kegiatannya untuk menuju tujuan yang hendak dicapai berdasarkan ketepatan biaya yang dikeluarkan, jumlah waktu dan anggota yang ditetapkan (Mutiarin & Khadafi, 2017).

Siagian (dalam Edi S:2012) menjelaskan pengertian efektivitas. Efektivitas merupakan penggunaan sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana yang sudah diatur kuantitatifnya untuk menetapkan keberhasilan beberapa barang atas jasa aktivitasnya yang digerakannya. Efektivitas adalah fokus keberhasilan atau tidaknya, tepat sasaran atau tidak. Apabila kebijakan atau program dekat dengan target yang dituju, artinya semakin tinggi efektivitasnya (Suryani, 2015).

Menurut Hayaningrat (1995) efektivitas adalah ukuran dalam keberhasilan mencapai target atau sasaran yang telah dibuat sebelumnya. Hadayaningrat menjelaskan ukuran efektivitas dapat dilihat dari target yang berupa waktu, kualitas dan kuantitas yang telah tercapai. Semakin besar presentase target yang tercapai, maka semakin tinggi efektivitasnya pula (Suryani, 2015).

Menurut Chung & Megginson, efektivitas adalah keterampilan atau sesuatu yang telah tercapai dan keahlian menyesuaikan diri dengan sekitar sehingga lingkungan organisasi masih tetap hidup. Efektivitas berhubungan dengan tujuan awal yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai (Asfi, 2015)

b. Kriteria Ukuran Efektivitas

Gibson menjelaskan beberapa kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas, diantaranya adalah: (Panggulu, 2013)

- 1) Produksi, ialah keahlian lembaga atau organisasi dalam menghasilkan beberapa keluaran sesuai pada keinginan yang ada.
- 2) Efisiensi, ialah membandingkan diantara masukan dan keluaran
- 3) Kepuasan, ialah tolak ukur dalam memperlihatkan tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
- 4) Keunggulan, ialah tingkat kemampuan dalam perubahan internal dan eksternal
- 5) Pengembangan, ialah tolak ukur keahlian organisasi untuk meningkatkan tanggungjawab untuk menjalankan keinginan masyarakat

c. Indikator-Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno (2007) indikator-indikator efektivitas diantaranya adalah: (Afrinaldi, 2017)

1. Pemahaman Program

Pada indikator ini artinya seberapa jauh masyarakat telah paham mengenai program. Suatu program dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari sering dilakukannya kegiatan sosialisasi atau pembinaan oleh kelompok yang bertanggungjawab pada pengentasan

kemiskinan. Sosialisasi yang dilakukan maka akan menimbulkan suatu pengetahuan yang dapat dipahami ke masyarakat. Memberikan materi pada saat sosialisasi penting, agar masyarakat bisa paham tentang materi yang disampaikan. Pemahaman program, diantaranya adalah:

a.) Sumber informasi anggota mengenai program (sosialisasi)

Pengenalan program sangat penting sebagai tempat sumber informasi. Pemerintah memberikan materi dalam sosialisasi dan menjelaskan manfaat yang akan diterima setelah mendapatkan sosialisasi. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan berhasilnya tujuan yang dicapai pada suatu program. Suatu program akan efektif pelaksanaannya apabila tercipta kontak hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dapat berlangsung secara baik.

b.) Tingkat pemahaman dan rasa tertarik sesudah memperoleh informasi mengenai program

Program dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat miskin melalui bantuan modal untuk mengembangkan usaha tidak hanya memberikan materi dan bantuan, namun juga menciptakan pemahaman dan rasa tertarik masyarakat dalam mengikuti program penanggulangan kemiskinan.

c.) Pengetahuan anggota tentang maksud program

Hal penting pada saat bimbingan dan sosialisasi yaitu dapat paham mengenai program dengan menyeluruh, maka dengan begitu program bantuan tersebut tepat sasaran, sesuai arahan, maka dengan hal ini diperlukan adanya pemahaman tentang program baik dalam bentuk materi ataupun praktek, agar masyarakat dapat mendapatkan

bantuan sesuai dengan keterampilannya dan pemerintah dapat mencapai tujuan program yang hendak dituju yaitu pengentasan kemiskinan.

2. Tepat Sasaran

Maksud dari tepat sasaran adalah masyarakat yang telah mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi adalah sasaran yang tepat yaitu masyarakat miskin. Program yang dibentuk pemerintah memang seharusnya mempunyai sasaran yang tepat, karena dalam sebuah program, apabila sesuai dengan sasaran yang akan dituju, maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Sasaran pada sebuah program harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, termasuk program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah, harus mempunyai sasaran yang tepat untuk memberantas kemiskinan. Tepat sasaran diantaranya adalah:

a.) Sasaran utama adalah masyarakat miskin

Melakukan observasi lapangan, kemudian validasi dan verifikasi data penduduk miskin adalah langkah yang dilakukan pemerintah dengan cara menentukan bagi siapa saja yang berhak menerima bantuan program, dan masyarakat miskin yang menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai kesejahteraan perekonomian dalam kehidupannya.

b.) Masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan

Pemerintah dalam menyusun program memfokuskan pada masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan yang belum dapat terpenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga perlu adanya keahlian dan keterampilan agar sehingga masyarakat lebih produktif dan kehidupannya bisa lebih sejahtera.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu disini dapat dilihat berdasarkan penggunaan waktu dan program pelatihan keterampilan yang ditunjukkan kepada masyarakat sudah sesuai apa yang telah disepakati. Tepat waktu disini diantaranya adalah:

a.) Sejak kapan memperoleh bantuan program

Sejak tahun berapa daerah atau wilayah sasaran mulai menerima bantuan atau sejak kapan mulai masuk program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

b.) Kuantitas waktu memperoleh pertemuan anggota program

Pelaksanaan pertemuan rutin anggota dengan pendamping program yang dilaksanakan pada waktu tertentu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan dan berjalannya program tersebut, kemudian kegiatan monev yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan dapat kita lihat dari suatu tujuan dicapai yang telah ditetapkan melalui program pengentasan kemiskinan. Tercapainya tujuan diantaranya adalah

a.) Mengembangkan pengetahuan masyarakat

Meningkatkan pengetahuan saat kegiatan sosialisasi dan bimbingan pasti akan berpengaruh positif pada pengetahuan yang diterima masyarakat.

b.) Peningkatan kemandirian dan keterampilan

Mengembangkan dan meningkatkan kemandirian anggota kelompok yang ada dalam mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga mereka bisa mandiri dan meningkatkan keterampilan mereka.

5. Perubahan dalam bentuk nyata

Kita dapat mengetahui suatu kegiatan berdampak baik dan dapat melakukan perubahan yang nyata bagi masyarakat dari program yang dilaksanakan. Perubahan dalam bentuk nyata diantaranya adalah :

- a.) Melihat dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, kreativitas dan pengenalan dengan lingkungan serta rasa percaya diri masyarakat sebelum ikut dalam kegiatan program.
- b.) Mengamati kreativitas, dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, dan pengenalan dengan lingkungan dan rasa percaya diri sesudah ikut dalam kegiatan program.

2. **Kemiskinan**

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut World Bank (2010) ialah suatu bentuk kurangnya kesejahteraan, selain itu memiliki keterkaitan dengan dimensi lainnya yaitu pendapatan yang rendah dan ketidakmampuannya untuk memperoleh barang dasar dan tingkat kesehatan yang rendah dan pendidikan, kurangnya kemampuan untuk memenuhi air bersih dan sanitasi (www.worldbank.org).

United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan pengertian kemiskinan dalam arti ketidakmampuan dalam mengembangkan pilihan yang ada dalam hidup, seperti memberikan nilai terhadap tidak adanya keikutsertaan dalam mengambil keputusan public yang menjadi salahsatu indicator kemiskinan.

Kuncoro (2003) menjelaskan pengertian dari kemiskinan sebagai ketidakberdayaan untuk memenuhi standar hidup yang paling dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah, kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Dwirandra, 2016).

Menurut Suparlan (2000) menjelaskan kemiskinan adalah keadaan dimana kehidupannya dalam kondisi kekurangan, kurang disini dalam arti bentuk benda dan harta yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang-orang yang menempati suatu daerah yang semuanya dalam keadaan miskin ataupun modalnya yang kurang kondisi dimana serba kekurangan, baik itu benda dan harta yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tinggal pada wilayah serba miskin maupun kurangnya modal, selain itu kurangnya jumlah keuangan yang dimilikinya, pengetahuan, penguatan sosial, politik, hukum ataupun akses sarana pelayanan umum dan ketersediaan kesempatan dalam bekerja (Pratama, 2014).

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab-penyebab kemiskinan menurut Bappenas (2011) diantaranya adalah :
(Prawoto, 2009)

1. Kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan
2. Rendahnya pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan
3. Rendahnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan
4. Sulitnya mendapatkan akses air bersih dan sanitasi air
5. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak jelas
6. Keadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang buruk

7. Jaminan akan rasa aman yang kurang dan Partisipasi yang rendah
8. Angka beban kependudukan yang tinggi
9. Tata kelola pemerintahan yang buruk

c. Jenis-jenis kemiskinan

Noor (dalam Murdiansyah:2014) membagi kemiskinan menjadi empat, diantaranya adalah :

1. Kemiskinan absolute

Kemiskinan absolute adalah kondisi dimana penghasilan kasar yang diperoleh setiap bulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan minimum

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif bisa dilihat dengan membandingkan antara satu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya

3. Kemiskinan structural

Keadaan dimana golongan orang tinggal di daerah kemiskinan, dan tidak ada kesempatan mereka untuk lepas dari kemiskinan

4. Kemiskinan kultural

Kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya, budaya disini adalah budaya miskin (Murdiansyah, 2014).

d. Prinsip-Prinsip Pengentasan Kemiskinan :

Pengentasan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya adalah: (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan).

1. Pemberdayaan
2. Partisipatif
3. Sinergi
4. Terukur
5. Transparan dan akuntabel
6. Berkelanjutan

e. Asas-asas pengentasan kemiskinan

Kemiskinan yang tinggi di Indonesia sudah seharusnya diatasi, agar jumlah kemiskinan yang tinggi tersebut dapat menurun, untuk menjalankan kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, maka, program tersebut harus berjalan berdasarkan asas-asas yang berlaku, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang optimal, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: (Suliswanto, 2010)

1. Objektif
2. Transparan
3. Keadilan
4. Akuntabel

f. Faktor-Faktor Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut Chambers, et al (dalam Muktasam:2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya program kemiskinan diantaranya adalah: (Chambers, 1996).

1. Pendekatan yang menyatu dan menyeluruh
2. Bersifat pengembangan sumber daya manusia

g. Faktor-Faktor Kegagalan Program Kemiskinan

Menurut Sumarto (2010) Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masih sulit untuk diatasi, diantaranya adalah:

1. Keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pertemuan rutin
2. Faktor-faktor pendukung produksi yang belum mencukupi
3. Tingkat pendidikan di pedesaan yang rendah
4. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kurang sesuai dengan keahlian masyarakat untuk ikut serta sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengikuti kegiatan tersebut (Miradj & Sumarno, 2014)

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Pengertian KUBE

Departemen Sosial RI (2005) menjelaskan pengertian KUBE, Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah kumpulan keluarga yang masuk ke dalam golongan miskin dan mempunyai kesepakatan untuk membentuk sebuah kegiatan yang berkembang dan saling berhubungan untuk mengembangkan produktivitas anggota, menumbuhkan kerjasama yang serta dan harmonis untuk menjadi tempat mengembangkan kegiatan usaha bersama (Ariyani, Fauzi, Juanda, & Beik, 2015).

Kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha yang dibina oleh Departemen Sosial yang terbentuk dari sekumpulan keluarga yang mendapatkan binaan sosial untuk melakukan aktivitas perekonomian untuk menghasilkan produktivitas dan kegiatan untuk membangun kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada bidang usaha kepada anggotanya serta memberikan manfaat pada orang-orang (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Republik Indonesia,2006). Dalam menangani permasalahan fakir miskin, pemerintah juga mengeluarkan sebuah peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemudian undang-undang lainnya yang saling berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembangunan Desa mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kemampuan SDM, kesejahteraan serta menanggulangi kemiskinan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana Desa, mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan dengan bijak. Memberikan kewenangan otonomi daerah sebagai salahsatu upaya untuk pengentasan kemiskinan juga di dukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Asal Mula Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan program-program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan dan rasa kepedulian serta keprihatinan

pemerintah terhadap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah membagi program pengentasan kemiskinan ke dalam tiga klaster (kelompok). Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berada pada klaster III yaitu program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha berbasis ekonomi produktif kerakyatan untuk pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin sehingga dapat menciptakan kemandirian dalam usaha, membuka lapangan pekerjaan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat miskin.

Sedangkan, nama-nama program berdasarkan klaster (tujuan) dan sasaran dari program yang dibentuk berdasarkan klaster oleh pemerintah dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang jumlahnya tinggi di Indonesia, pembagian program menurut klaster dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Kelompok Program dan Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

Keterangan	Program	Sasaran
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin, dan Sangat Miskin
	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

Kelompok Program 1	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	SD/MI	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	SMP/MTs	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	SMA/MA/SMK	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
Kelompok Program 2	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri:	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman Tertinggal dan Terluar
	d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Kelompok Masyarakat Pedesaan
	e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Pedesaan
	f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Pedesaan

	g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	j. PNPM <i>Green Kecamatan Development Program (G-KDP)</i>	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	k. PNPM <i>Neighbourhood Development (ND)</i>	Kelompok Masyarakat Perkotaan
Kelompok Program 3	a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	b. Program KUBE dan UEP	Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif

Sumber : Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, 2011

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari tahun 1990. Pembentukan program KUBE memiliki keinginan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat mengalami penurunan jumlahnya. KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dapat menciptakan hubungan yang erat, mengembangkan kreativitas, menumbuhkan rasa setia kawan dan kebersamaan, dan menumbuhkan rasa mandiri diantara sesama anggota KUBE. Kemudian, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian di

Indonesia. Target dari kebijakan program pengentasan kemiskinan KUBE tahun 2014-2015 diantaranya sebagai berikut :

1. Menciptakan kualitas SDM baik dari aparatur maupun kesejahteraan sosial masyarakat sejumlah 10% tahun
2. Penurunan jumlah penduduk miskin dan masalah kesejahteraan yang sering terjadi di masyarakat
3. Jumlah dan keterampilan masyarakat dalam bentuk kelembagaan maupun perorangan pada hal menangani masalah kesejahteraan bisa meningkat

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salahsatu program pemberdayaan masyarakat yang telah dikenal sebagai program yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial RI, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut data Kementerian Sosial (www.kemosos.go.id) pada tahun 2010 target pelaksanaan KUBE di 33 provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 132.363. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sendiri telah berjalan sejak tahun 1983, dan sampai saat ini masih dilaksanakan di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia (Kemensos,2010).

Sehingga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dirasa sebagai salahsatu program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasa mampu dalam mengurangi angka kamiskinan yang ada di Indonesia, dengan menerapkan sistem pelatihan pemberdayaan dan keterampilan bagi warga miskin. Munculnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ialah untuk mendorong masyarakat miskin agar melangkah lebih maju dalam hal ekonomi dan sosial. Menciptakan hubungan dan kerjasama di dalam kelompok, meningkatkan ketersediaan daerah dalam bidang sosial ekonomi.

c. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Indonesia adalah :

- 1.) Undang Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), pasal 28 huruf H ayat 3, pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2
- 2.) Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin
- 4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian tugas Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- 5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 6.) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 7.) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010, tentang struktur organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 8.) Peraturan Kementerian Sosial Nomor 129/HUK/2008, tentang standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 9.) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir miskin

- 10) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat
- 11) Keputusan Bersama Menteri koperasi, pengusaha kecil dan Menengah dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05/ SKB/M/V/1999 dan Nomor 45/ HUK/1999 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui pembentukan Koperasi
- 12) Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor 293/2002 dan Nomor 40/PEGHUK/2002, tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin.

d. Indikator-indikator keberhasilan bantuan KUBE

Menurut Kemensos (1994) Indikator-indikator keberhasilan bantuan KUBE diantaranya adalah :

- 1) Mengembangkan usaha ekonomi berbasis kelompok
- 2) Keadaan kesejahteraan sosial dalam Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara menyeluruh
- 3) Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) atau Sumbangan Sosial Wajib (SSW) dan perkembangan gotong royong
- 4) Mengembangkan koperasi kelompok
- 5) Melaksanakan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan pada organisasi sosial
- 6) Mengembangkan tabungan dan tabanas

- 7) Turut sertanya Keluarga Binaan Sosial (KBS) pada program Keluarga Berencana (KB), posyandu dan wajib belajar
- 8) Terdapat atau tidaknya keikutsertaan dalam kegiatan karang taruna
- 9) Pengaruh proyek bantuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Yasin, 2015).

e. Syarat Pembentukan dan Keanggotaan KUBE

Syarat untuk membentuk dan menjadi anggota KUBE menurut Kementerian Sosial dalam website (www.kemsos.go.id) adalah:

1. Tujuan utama pembentukannya KUBE untuk masyarakat miskin lebih mandiri dan produktif
1. Pada setiap KUBE anggota yang ada di dalamnya berjumlah 10 KK
2. Anggota yang tergabung dalam KUBE adalah yang berusia 15-55 tahun dan sudah menikah
3. Mempunyai kegiatan sosial dan Unit Ekonomi Produktif (UEP)
5. Mempunyai pembukuan maupun catatan keuangan
6. Direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

f. Tujuan dibentuknya KUBE

Tujuan dikeluarkannya Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diantaranya adalah: (Kemensos,2010)

1. Meningkatkan keterampilan dalam berusaha bagi anggota KUBE dalam kelompok

2. Meningkatkan penghasilan
3. Mengembangkan usaha
4. Meningkatkan kesadaran sosial antara anggota KUBE dengan masyarakat lainnya.

f. Bentuk-Bentuk KUBE

Program yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman, dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam website resmi (www.kemsos.go.id) memiliki bentuk-bentuk yang ada pada setiap KUBE, bentuk-bentuk tersebut diantaranya adalah :

1. KUBE Pertumbuhan

Artinya KUBE disini merupakan bentuk awal KUBE

2. KUBE Pengembangan

Pada tahapan ini, KUBE sudah bisa dikatakan berhasil dalam bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), administrasi ataupun kegiatan kelompok yang telah berjalan sedikitnya dalam waktu 2 tahun

3. KUBE Mandiri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

KUBE yang berada langsung dibawah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang dikembangkan dari kegiatan Lembaga Keuangan Mikro.

g. Pendekatan pelaksanaan program KUBE

Pendekatan pelaksanaan program KUBE dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada pembangunan pada masyarakat (*community based development approach*).
2. Pendekatan yang berdasarkan pada kesamaan kegiatan, kesamaan tempat tinggal, tujuan yang sama, mengarah pada efektivitas dan efisiensi dan mendorong adanya modal usaha
3. KUBE merupakan sebuah sarana dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

h. Pembentukan Kegiatan KUBE

Dalam Program KUBE pada pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan pembentukan, diantaranya adalah : (Nurwati, 2008)

1. Melaksanakan keterampilan usaha, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan praktik dalam berusaha yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan keahlian oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelatihan dapat menciptakan rasa kepercayaan diri untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan dapat memperbaiki kehidupan
2. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pemberian modal kerja diberikan sesuai dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan yang diberikan adalah hibah bukan berupa pinjaman atau kredit

3. Peran pendampingan sangat penting dalam keberhasilan dan perkembangan KUBE. Melihat bahwa PMKS adalah sekelompok masyarakat miskin. Pendampingan secara fungsional dilakukan Petugas Sosial Kecamatan yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos).

i. Tahap-Tahap Program Kegiatan KUBE

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi yang ada di Dinas Sosial Provinsi DIY (<http://dinsos.jogjaprov.go.id> Diakses pada 31 Oktober 2018), dijelaskan di dalamnya terkait mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam program pengentasan kemiskinan yang ada di Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah :

**Tabel 1.5
Tahap-Tahap Program Kegiatan KUBE**

No	TAHAPAN	KEGIATAN
1	Tahap Persiapan (T0)	1. Menentukan sasaran, lokasi daerah oleh Kemensos melalui pengamatan dan orientasi 2. Melaksanakan sosialisasi program oleh Dinas Sosial Perekrutan pendamping 3. Melaksanakan kegiatan latihan pendamping 4. Membuat perjanjian kerja pendamping setelah kegiatan rekrutmen dan pelatihan 5. Menentukan kebenaran data (verifikasi) oleh

		<p>pendamping</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Membentuk kelompok usaha bersama 7. Menentukan jenis usaha produktif kemudian membuat dan mengajukan proposal 8. Menentukan masyarakat penerima bantuan modal Program KUBE melalui SK Direktur Penanggulangan Kemiskinan perdesaan dan perkotaan 9. Pelaksanaan sosialisasi dari Dinas Sosial ke pendamping dan anggota KUBE yang sudah terbentuk
No	TAHAPAN	KEGIATAN
2.	Tahap Pembentukan/Perintisan UEP (T1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat buku tabungan rekening setiap kelompok 2. Menyalurkan bantuan dan pencairan dana 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada anggota KUBE 4. Perkumpulan rutin setiap bulan setiap kelompok dan pendamping 5. Monitoring dan evaluasi
3.	Tahap Pengembangan (T2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan UEP didampingi pendamping 2. Pemantauan dan evaluasi
4	Tahap Kemitraan (T3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kerjasama usaha kelompok dengan didampingi oleh pendamping dalam 6 bulan pertama serta pemanfaatan sumberdaya

		2. Mengembangkan dan menjalin jaringan kerjasama usaha dan melaksanakan kesepakatan
5.	Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan program sudah sesuai rencana 2. Evaluasi wajib dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari program sudah mencapai tujuan.

Sumber : Buku Pedoman KUBE, 2015

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan program yang berlandaskan pada target sasaran yang sudah ditetapkan agar pelaksanaannya dapat mencapai keberhasilan dalam program dengan tidak mengabaikan kualitas yang dihasilkan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan dengan keadaan dimana seseorang tidak dapat mencukupi kehidupan mereka yang paling dasar, seperti kebutuhan dalam hal makanan dan pakaian.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah sekumpulan rumah tangga yang tergolong ke dalam kategori miskin yang membentuk sebuah perkumpulan dalam sebuah kegiatan pelatihan pemberdayaan sebagai wadah atau sarana untuk mengembangkan potensi, keahlian guna meningkatkan pendapatan pada setiap rumah tangga anggota

KUBE, dan menciptakan kerjasama yang kuat untuk menciptakan keberhasilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

H. Definisi Operasional

Sugiyono (2007) menjelaskan definisi operasional adalah suatu ukuran dari suatu sifat yang menjadi dasar sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2007). Sedangkan, menurut Koentjaraningrat (2008) adalah suatu usaha untuk mengonsep suatu konstruk dengan suatu kata yang menjelaskan perilaku maupun gejala yang dapat diuji kebenarannya oleh yang lainnya (Koentjaraningrat, 2008). Setelah melihat dan menerapkan teori yang digunakan, maka penulis menggunakan definisi operasional berdasarkan teori efektivitas dan teori pengentasan kemiskinan.

1. Efektivitas

Berdasarkan teori efektivitas yang digunakan oleh penulis yaitu teori yang dituliskan oleh Sutrisno (2007), variabel dan indikator-indikator efektivitas diantaranya adalah :

NO	Variabel	Indikator-Indikator
1.	Pemahaman Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber informasi anggota mengenai program (Sosialisasi) b. Tingkat pemahaman dan rasa tertarik anggota sesudah memperoleh informasi mengenai program c. Pengetahuan anggota tentang maksud program
2.	Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran utama adalah masyarakat miskin

		b. Masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan
3.	Tepat Waktu	a. Sejak kapan memperoleh bantuan program pelatihan keterampilan b. Kuantitas waktu pertemuan
No	Variabel	Indikator-Indikator
4.	Tercapainya Tujuan	a. Mengembangkan pengetahuan masyarakat b. Peningkatan kemandirian dan keterampilan
5.	Perubahan Dalam Bentuk Nyata	a. Melihat dorongan dalam diri, kesiapan, kreativitas serta rasa percaya diri masyarakat sebelum ikut dalam kegiatan program b. Mengamati kreativitas, dorongan dalam diri, kesiapan, serta rasa percaya diri sesudah ikut dalam kegiatan program

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan program yang berjalan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan, terdapat faktor yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor pendukung dari keberhasilan sebuah program menurut Chambers (2011) dan factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program menurut Sumarto (2011), variabel dan indikator-indikatornya adalah :

NO	Variabel	Indikator-Indikator
1.	Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan yang menyatu dan menyeluruh b. Bersifat pengembangan sumber daya manusia
2.	Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pertemuan rutin b. Faktor-faktor pendukung produksi yang belum mencukupi c. Tingkat pendidikan di pedesaan yang rendah d. Perencanaan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulisan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi bagi subyek penelitian secara menyeluruh melalui penjelasan berupa kata-kata dan bahasa, dalam sebuah bahasan khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Menggunakan jenis penelitian kualitatif, dikarenakan dalam keunggulan yang dimiliki yaitu, berusaha berinteraksi dengan

informannya secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara yang tidak memaksa (Moleong, 2007).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki maksud untuk menjelaskan sebuah permasalahan atau objek tertentu secara rinci (Suyanto, 2007). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang sedang berlaku saat ini. Pada penelitian deskriptif terdapat cara untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian deskriptif tidak menguji hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi terkait dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 1999). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai efektivitas program KUBE Sejahtera dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman secara menyeluruh dan rinci dalam bentuk penjelasan agar data yang didapatkan lebih lengkap dan mudah dimengerti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian yang digunakan dalam penelitian efektivitas program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Bapak Sukamto, AKS., M.Si selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Perkotaan dan Pesisir Dinas Sosial Provinsi DIY
- 2) Bapak Feri selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sleman
- 3) Ibu Reni selaku Staff Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sleman (Anggota TKPK Sleman)
- 4) Bapak Yudi selaku Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan Caturharjo
- 5) Ibu Puji Lestari selaku Pendamping KUBE Sejahtera Desa Caturharjo
- 6) Bapak Panut sebagai Ketua dari KUBE Sejahtera XV.SLKT.005
- 7) Anggota KUBE Sejahtera (6 orang)
 - a) Bapak Yoto sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SL.KT 009
 - b) Bapak Sardi sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SL.KT 010
 - c) Bapak Kawid sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SL.KT 007
 - d) Bapak Panut sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SLKT.005
 - e) Ibu Wiwit sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SLKT.004
 - f) Ibu Nurul sebagai anggota dari KUBE Sejahtera XV.SLKT.001
- 8) Kepala Dukuh (2 orang)
 - a) Bapak Bambang sebagai Kepala Dukuh Nambongan
 - b) Ibu Yus sebagai Ibu Dukuh Dalangan

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan menyusun penelitian ini adalah antara lain :

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari langsung didapatkan dari informan atau narasumber. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, tentang aspek yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti langsung datang ke tempat lokasi yang mereka jadikan fokus penelitian, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan cara turun langsung ke lokasi tempat penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Selain data primer yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, Data yang digunakan selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, berita-berita, jurnal, website-website serta artikel hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti pergunakan.

J. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa beberapa teknik, diantaranya adalah:

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah, jurnal ilmiah, buku-buku teori, laman website, dan surat kabar online. Data yang didapat dari penelusuran dan

analisis dokumen ini merupakan data sekunder sebagai pendukung dari data primer yang didapat dari teknik wawancara dan observasi (Sugiyono, 2007)

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah salahsatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara mempunyai arti cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan narasumber atau informan dengan cara bertanya secara langsung dengan bertatap muka (Bagong Suyanto, 2007). Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data langsung dari informan atau narasumber, data yang didapatkan langsung dari narasumber atau informan ini adalah yang merupakan sebagai data primer. Kita bisa melakukan wawancara dengan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait hal yang akan dibahas dalam penelitian kita. Informan atau responden akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Pertanyaan bisa kita siapkan sebelum wawancara atau bisa disebut sebagai wawancara terstruktur. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara yang berlokasi di Desa Caturharjo dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

K. Teknik Analisa Data

Analisis data untuk penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dan setelah selesai pengumpulan datanya. Miles dan Huberman, mengatakan aktivitas menganalisis sebuah data kualitatif dengan melakukannya dengan cara interaktif serta langsung dengan terus – menerus sampai

selesai, pada akhirnya data sampai terkumpul semuanya (Miles MB, 2009). Aktivitas untuk menganalisis sebuah data adalah dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Merangkum maksudnya semua data yang sudah di jadikan satu untuk di ambil intinya saja yang penting dari keseluruhan datanya. Pada akhirnya data–data yang sudah di dapat dari hasil rangkuman tadi bisa memberi sebuah penjelasan serta dapat mempermudah seseorang yang menelitinya untuk dapat mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah di reduksi semua datanya selanjutnya ialah mendisplay data–data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa diterapkan dalam penjelasan yang hanya intinya saja yang penting, struktur, yang saling mempunyai hubungan satu dengan lainnya kategori, serta diagram air. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiono:2009) menyatakan bahwa sering dilakukan sebagai penyajian data ditampilkan pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks naratif.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir untuk menganalisis menurut Miles and Huberman yaitu melakukan sebuah pengambilan kesimpulan serta verifikasi, untuk kesimpulan pada awalnya hanya bersifat sementara serta dapat berubah–ubah apabila tidak menemukan fakta atau buktinya yang dapat memperkuat serta mendukung adanya tahapan pengumpulan data selanjutnya. Tapi apabila sebuah kesimpulan yang sudah

ditetapkan di awalnya yang sudah terdapat bukti yang nyata atau benar serta konsistensi seseorang yang meneliti kembali lagi ke lapangan agar dapat terkumpulnya data–data maka kesimpulan tersebut yang bersifat kredibel.